

Polisi Upayakan Mediasi Kasus ITE yang Jerat Pengurus IPW

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya merespons protes Indonesia Police Watch (IPW) soal penersangkaan Ketua Bidang Investigasi IPW, Joseph Erwiantoro, yang dinilai tidak sejalan dengan Surat Edaran (SE) Kapolri soal penanganan kasus UU ITE. Polda Metro Jaya mengupayakan perkara tersebut untuk dimediasi sesuai SE Kapolri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan Selasa (23/2), pihaknya memanggil Joseph Erwiantoro sebagai tersangka di kasus tersebut. Menyikapi SE Kapolri ini, Yusri mengatakan pihaknya mengupayakan penyelesaian kasus dengan jalan mediasi.

"Jadi ini berlangsung, tapi kami menyikapi apa surat edaran oleh Pak Kapolri. Yang kita kedepankan adalah persuasif dan mediasi yang kita kedepankan. Sambung dengan masalah ini hari ini sudah datang yang bersangkutan. Kita tidak lakukan pemeriksaan, kita upayakan persuasif kemudian kita mediasi dengan si pelapor. Kita mediasi kepada pelapor," jelas Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (23/2).

Yusri mengatakan kasus itu akan terus berlanjut apabila pihak pelapor tidak mau mencabut laporannya. Akan tetapi, penyidik kepolisian akan terus mengupayakan

agar kedua pihak bisa dimediasi.

"Jadi pertanyaan apakah pelapor terima atau tidak? Kalau tidak terima, hukum tetap berjalan. Tetapi kita upayakan semaksimal mungkin kita lakukan mediasi dan tidak lakukan penahanan," kata Yusri.

Polda Metro Jaya juga akan berkoordinasi dengan jaksa jika kasus itu harus bergulir ke kejaksaan.

"Kemudian kedua kalau sampai nanti ke JPU. Toh kami juga sama kami berkoordinasi dengan JPU untuk dikedepankan adalah mediasi untuk kasus ini," imbuhnya.

Lebih lanjut, Yusri menjelaskan bahwa kasus UU ITE yang menjerat Joseph Erwiantoro ini bukan kasus baru. Yusri menegaskan kasus itu mulai disidik sebelum SE Kapolri soal penanganan kasus ITE keluar.

"Jadi bukan kasus ini baru. Laporan polisi ini sudah 2020 kasus ini sudah masuk ke Polda Metro Jaya dan sudah masuk ke penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka terhadap terlapor karena sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kita sikapi dengan surat edaran dari Kapolri kita kedepankan persuasif dan mediasi yang kita kedepankan hari ini," paparnya. ● **lus**

Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Ciliwung Pademangan

JAKARTA (IM) - Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di Kali Ciliwung Pademangan, Ancol, Jakarta Utara.

Jenazah wanita tersebut pertama kali ditemukan petugas UPK Badan Air Kecamatan Pademangan saat membersihkan kali pada Senin kemarin.

"Sampai pagi ini, sementara belum kami temukan identitasnya," ujar Kapolsek Pademangan, Komisaris Arga Dija Putera, Selasa (23/2).

Arga menjelaskan jenazah wanita itu sampai sekarang masih berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, untuk menunggu pihak keluarga mengambil. Adapun ciri-ciri korban saat ditemukan, kata Arga, antara

lain mengenakan baju batik dan berusia sekitar 30 tahun.

Penemuan jenazah wanita itu sempat membuat masyarakat geger. Petugas UPK Badan Air Kecamatan Pademangan menemukan tubuh wanita malang itu tepat di bawah jembatan Jalan Lodan Raya.

Saat ditemukan, petugas sempat mengira sosok tersebut adalah sampah yang terangkut. Namun saat didekati, ternyata sosok itu adalah mayat wanita dalam kondisi sudah membusuk dengan posisi tertelungkup.

Petugas memperkirakan mayat perempuan tersebut hanyut dibawa air banjir. Apa lagi beberapa hari yang lalu, Kali Ciliwung sempat pasang akibat hujan deras di Jakarta. ● **lus**

Bongkar Praktik Klinik Kecantikan Ilegal, Polisi Tangkap Dokter Gadungan

JAKARTA (IM) - Polisi membongkar praktik klinik kecantikan ilegal yang beroperasi di daerah TB. Simatupang, Susukan Ciracas, Jakarta Timur pada 14 Februari 2021. Polisi menangkap SW alias Y yang merupakan pemilik klinik bernama Zevmine Skin Care sekaligus berperan sebagai dokter. "Berhasil diamankan satu tersangka inisial SW alias Y. Dia adalah pemilik klinik kemudian juga yang melakukan praktik dokter kecantikan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat rilis yang disiarkan secara daring, Selasa (23/2).

Yusri menjelaskan, pengungkapan klinik kecantikan tersebut bermula adanya laporan yang diterima Subdit 3 Sumdaling Polda Metro Jaya. "Kemudian kita coba penyelidikan. Karena menyangkut masalah kecantikan jadi polwan yang kita kede-

pankan untuk penyelidikan dan selaku kita amankan," kata Yusri.

Menurut Yusri, selama buka praktik klinik kecantikan, tersangka tidak memiliki legalitas sebagai seorang dokter. "Tapi hampir sebagian besar (konsumen) mengetahui yang bersangkutan adalah dokter. Klinik itu praktik dalam satu ruko dan panggilan. Tindakan medis, pertama melakukan injeksi botox, injeksi filler dan tanam benang," kata Yusri.

Berdasarkan penangkapan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa beberapa peralatan kesehatan, jarum suntik, selang facial dan lainnya. Tersangka persangkakan Pasal 77 jo Pasal 73 Ayat (1) dan atau Pasal 78 jo Pasal 73 (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda Rp 150 juta. ● **lus**

12 | PoliceLine

IDN/ANTARA



PENGUNGKAPAN EMPAT KILOGRAM SABU DI LAMPUNG

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung Brigjen Pol Jafriedi (kiri) bersama Kabid Brantas BNP Lampung Kombes Pol Toto Lisdiarto (kanan) memperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu di kantor BNNP Lampung, Lampung, Selasa (23/2). BNNP Lampung berhasil mengamankan dua tersangka kurir narkoba beserta barang bukti narkoba jenis sabu seberat empat kilogram yang merupakan jaringan Aceh-Bandung.

DPR Minta Polri Tindak Tegas Dua Anggota Jual Senjata ke KKB di Papua

Polri harus bertindak tegas kepada aparat yang diduga terlibat, apalagi jika senjata yang dijual justru digunakan untuk melukai dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua. Polri juga harus berani menyelidiki secara lebih dalam terkait siapa pemasok senjata api tersebut dan harus ditangkap pemasok utamanya.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalang meminta Polri bertindak tegas dua anggota polisi yang diduga menjual senjata dan amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Dia mengecam tindakan dua anggota polisi yang berasal dari Polresta Ambon dan Polres Pulau Lease yang diduga menjual senjata api dan amunisi kepada KKB di Papua.

"Polri harus bertindak tegas kepada aparat yang diduga terlibat, apalagi jika senjata yang dijual justru digunakan untuk melukai dan mengganggu

keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua," kata Andi Rio dalam keterangannya, Selasa (23/2).

Dia meminta Polri berani menyelidiki secara lebih dalam terkait siapa pemasok senjata api tersebut dan harus ditangkap pemasok utamanya.

Andi Rio berharap tidak ada lagi oknum Polri yang terlibat menjual senjata dalam skala menengah atau besar kepada KKB.

Politikus Partai Golkar itu meminta Polri dapat melakukan pengawasan terhadap para personel di lapangan secara ketat, usai terbongkarnya kasus

tersebut.

"Semoga ini yang terakhir dan Polri harus transparan terhadap pengembangan penyelidikan yang dilakukan," ujarnya.

Selain itu, Andi Rio mengharapkan agar konflik yang terjadi di Papua dapat segera menemui solusi sehingga tercipta situasi aman dan damai di Bumi Cenderawasih.

Dia meminta pemerintah segera menyelesaikan konflik di Papua agar tidak ada lagi korban jiwa.

Sebelumnya, dua oknum anggota Polresta Pulau Ambon dan Polres Pulau Lease dituntut karena diduga menjual senjata api beserta amunisi ilegal kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M Roem Ohoirat mengatakan penangkapan dua oknum polisi itu berawal dari penangkapan pembelinya di Papua Barat.

"Mulanya Polres Bintuni, Papua Barat, menangkap warga yang membelinya beserta barang bukti berupa senjata api. Lalu (kasus) dikembangkan

kan dan ditangkap (oknum anggota Polri)," kata Roem.

Dalam perkembangannya, Divisi Propam Polri mengimkan tim khusus untuk mem-

bantu Propam Polda Maluku menyelidiki kasus penjualan senjata api kepada KKB Papua yang diduga dilakukan dua oknum polisi di Maluku. ● **lus**

SE Kapolri Tak Cukup, YLBHI Tetap Desak Revisi UU ITE

JAKARTA (IM) - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai penerbitan Surat Edaran Kapolri terkait pedoman penanganan kasus Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tak cukup mampu menyelesaikan akar masalah beleid tersebut.

Ketua YLBHI, Asfinawati mengungkapkan masih banyak problem mendasar yang dalam penerapannya tidak dapat diatur melalui surat edaran Kapolri. Terlebih, menurut dia SE Kapolri itu tak merincikan tafsiran polisi atas kasus-kasus yang berkaitan dengan UU ITE.

"Penerapan SE semacam ini kan tergantung polisi. Tapi masalah mendasar di Undang-undang [UUITE] kan gak bisa [terselesaikan]," tutur Asfinawati, Selasa (23/2).

Itu sebabnya Asfin menegaskan, yang diperlukan saat ini adalah merevisi UU ITE. Alih-alih mengurai permasalahan dalam UU ITE secara utuh, SE Kapolri justru berpotensi bertolak belakang dengan sejumlah edaran yang pernah diterbitkan Kapolri terdahulu.

Salah satunya, Asfin mencontohkan, merujuk pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (Hate Speech). Dalam beleid ini, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti yang kala itu menjabat Kapolri memberikan panduan jeratan pasal-pasal yang dapat disematkan dalam perkara ujaran kebencian apabila tindakan preventif kepolisian tak berjalan baik.

"Lebih dari itu SE ini bertentangan dengan SE Kapolri tentang Hate Speech. Yang menyangkut SARA, tapi dalam SE itu dikatakan diutamakan mediasi juga. Jadi enggak baca yang sebelumnya ini," tutur Asfin.

"Artinya yang baru jadi bertentangan dengan yang lama," tambah dia lagi.

Karena itulah Asfin menekankan, permasalahan UU ITE tidak dapat dirampungkan hanya dengan menerbitkan SE Kapolri.

Asfin kembali menegaskan

DANA MEMBER TERKUMPUL RP20 M

Polda Aceh Selidiki Investasi Bodong Yalsa Boutique

BANDA ACEH (IM) - Polda Aceh tengah menyelidiki dugaan investasi bodong bisnis pakaian muslim yang dilakukan Yalsa Boutique. Dalam kasus ini, terhimpun dana Rp 20 miliar dari 3.755 member.

"Bahwa kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Aceh dengan LP model A tanggal 11 Februari 2021. Dalam kasus ini, Yalsa Boutique menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari OJK," kata Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardy kepada wartawan, Selasa (23/2).

Winardy mengatakan polisi telah memeriksa 13 orang dalam kasus tersebut, yaitu owner Yalsa Boutique yang merupakan pasangan suami-istri hingga admin. Tugas admin adalah mencatat dana yang sudah dihimpun oleh reseller.

Dalam bisnis tersebut, reseller direkrut oleh owner

dan ditugaskan untuk merekrut anggota baru. Winardy menjelaskan Yalsa Boutique memiliki 225 reseller serta 3.755 member yang tersebar di Aceh, Medan, serta Riau.

"Setelah dihimpun dana oleh reseller ini, kemudian dilaporkan ke admin, disetorkan sejumlah dana sesuai dengan investasi yang dilakukan para member. Jadi jumlahnya bervariasi, jumlah terkecil Rp 500 ribu sampai puluhan juta rupiah," jelas Winardy.

"Yalsa Boutique ini menghimpun dana atau investasi dari masyarakat dengan menjanjikan keuntungan dari hasil penjualan baju CV Yalsa Boutique itu kisaran 30 persen sampai 50 persen," sambung Winardy.

Winardy menuturkan, dalam investasi tersebut, para member tidak boleh mengambil dana yang sudah di-

investasikan dalam jangka waktu enam bulan. Pada awal investasi, sebagian member sudah berhasil menarik kembali dana setelah melewati tenggat.

"Tapi memasuki 2021, karena sudah mulai bermasalah, dana itu disetop oleh owner, tidak ada lagi boleh ambil dan dianggap hangus," bebarnya.

Polisi meminta member investasi yang merasa dirugikan untuk melapor. Winardy menyebut dana yang dihimpun Yalsa Boutique mencapai puluhan miliar rupiah.

"Total dana yang dihimpun sudah lebih-kurang Rp 20 miliar. Kita harapkan member segera melapor ke Polda Aceh untuk pendataan dan pemeriksaan. Nah, keterangan dari OJK bahwa Yalsa Member ini tidak memiliki izin menghimpun dana dari masyarakat," sebut Winardy. ● **lus**

Polisi di Enrekan Uji Narkoba dengan Metode Air Liur

MAKASSAR (IM) - Kepala Polres Enrekan, AKBP Andi Sinjaya Ghalib, bersama anggotanya diuji narkoba dengan menggunakan metode drugwipe atau pemeriksaan lewat air liur sesuai dengan instruksi Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Ghalib melalui keterangannya, di Makassar, Selasa (23/2), menyatakan, uji narkoba dimulai dari dia diikuti para pejabat dan seluruh personel. Untuk tes narkoba tahap awal itu menggunakan skala prioritas bagi setiap anggota

yakni mendahulukan personel dengan perilaku keseharian, kinerja serta penilaian dari kepala satuan masing-masing. "Untuk hari ini yang dites

itu dipilih secara acak berdasarkan perilaku keseharian, kinerja serta penilaian dari kepala satuanya," katanya.

Melalui metode air liur, katanya, hasilnya bisa diketahui dalam jangka waktu 5-15 menit setelah alat uji memberikan kode tertentu pada air liur yang diperiksa. Ia menyatakan, upaya ini akan terus dilaksanakan agar seluruh personel Polres Enrekan tidak terjerumus memakai narkoba atau terlibat jaringan pengedar.

"Jika memang ada terbukti mengkonsumsi bahkan menggunakan narkoba, saya tindak tegas melalui proses disiplin, kode etik, pidana hingga pemberhentian sebagai anggota Polri secara tidak hormat sesuai hukum yang berlaku," ucap dia. ● **lus**

國際日報
Guo Ji Ri Bao - Medan
Lowongan Kerja 职位空缺
MARKETING FREELANCE

Syarat :

- Di Utamakan Bisa berbahasa mandarin lisan dan tulisan
- Penampilan Menarik dan Rapi
- Orientasi Target dan Komisi
- Minimal Lulusan SMA / Sederajat
- Berpengalaman di bidang Marketing
- Domisili Medan - Sumatera Utara

Lamaran dikirim Via Email :
w.pandjaitan1@gmail.com



PENGUNGKAPAN KASUS NARKOTIKA DI PEKANBARU

Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Pekanbaru menunjukkan lima orang kurir narkoba saat rilis kasus di Riau, Selasa (23/2). Polisi setempat berhasil mengamankan lima orang kurir beserta barang bukti sabu sebanyak 2.936,27 gram dan uang tunai senilai Rp18.010.000.